

Pengembangan Model Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Peran *Opinion Leader*

Niken Lestarini

Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo

lestarini.niken@gmail.com

Abstract

This study aims to develop a model of socialization of the National Health Insurance through the role of Opinion Leader. The development of socialization model of National Health Insurance through the role of Opinion Leader is important because with the inclusion of communication technology in Rural areas has led to the emergence of social distance between opinion leaders (Opinion Leader) with the community. Although acknowledged that opinion leaders in Indonesia are still very instrumental in influencing the attitude and behavior of followers in the village. This research is also important to assist the Ponorogo Regency Government in implementing the National Health Insurance (JKN) Act organized by Social Security Administering Board (BPJS). This research is a continuation of research of Opinion Leader role which shows that its role is very high in socialization about National Health Insurance in the village. This research uses qualitative research paradigm. Data collection techniques used are in-depth interviews, observation and documentation. Teknik Determination Informants using snowball technique, ie without determining the number of informants but based on information provided in accordance with the data required. Then the method of data analysis using Interactive Analysis Model. The results of research and discussion can be concluded that the Government set a target that in 2019 all Indonesian people have registered and have a card of National Health Insurance - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). So it has become a necessity for the socialization model that can really touch the people so that the target of the government can be achieved. Because JKN-KIS has become the thing that is needed by the society in carrying out their life to be healthy and prosperous and has been poured in Government regulation, the socialization model used belongs to the Represif socialization model. This socialization runs in one direction from one person to another. The implementation of the socialization of JKN-KIS should not only be the responsibility of the central and regional governments but the responsibility of all parties including the community as a whole. Through the role of Opinion Leader both formally and informally in the village community is needed because Opinion Leader is very close to the community and the place to ask related to all aspects of village life, in addition to understanding JKN-KIS there is awareness to become a participant of JKN-KIS both government-financed As well as pay dues independently.

Keywords: *Socialization Model of National Health Insurance, Role of Opinion Leader*

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun pengembangan model sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional melalui peran Opinion Leader. Pengembangan model sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional melalui peran Opinion Leader penting dilakukan karena dengan masuknya teknologi komunikasi di Pedesaan telah menyebabkan munculnya jarak sosial antara pemimpin

opini (Opinion Leader) dengan masyarakatnya. Meski diakui bahwa pemimpin opini di Indonesia masih sangat berperan dalam mempengaruhi sikap dan perilaku pengikutnya di desa. Penelitian ini juga penting dilakukan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menerapkan Undang-Undang tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian tentang peran Opinion Leader yang menunjukkan bahwa perannya sangat tinggi dalam sosialisasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional di desa. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik Penentuan Informan menggunakan teknik bola salju, yaitu tanpa menentukan jumlah informan tetapi berdasarkan informasi yang diberikan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Kemudian metode analisis data menggunakan Model Analisis Interaktif. Hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah menetapkan target bahwa tahun 2019 semua masyarakat Indonesia telah terdaftar dan mempunyai kartu Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Maka sudah menjadi keniscayaan perlunya model sosialisasi yang benar-benar bisa menyentuh rakyat agar target pemerintah bisa tercapai. Karena JKN-KIS sudah menjadi hal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya agar sehat dan sejahtera dan telah dituangkan dalam peraturan Pemerintah maka model sosialisasi yang dipakai tergolong ke dalam Model sosialisasi Represif. Sosialisasi ini berjalan dengan satu arah dari seseorang kepada orang yang lainnya. Pelaksanaan sosialisasi tentang JKN-KIS seharusnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja baik pusat maupun daerah tetapi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat secara keseluruhan. Melalui peran Opinion Leader baik secara formal maupun informal di masyarakat desa sangat dibutuhkan karena Opinion Leader sangat dekat dengan masyarakat dan tempat bertanya terkait dengan semua aspek kehidupan masyarakat desa, selain memahami JKN-KIS tersebut ada kesadaran untuk menjadi peserta JKN-KIS baik yang dibiayai pemerintah maupun membayar iuran secara mandiri.

Kata Kunci: *Model Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional, Peran Opinion Leader*

<i>Submit</i>	: 17 Jan 2017
<i>Review</i>	: 30 April 2017
<i>Accepted</i>	: 30 Mei 2017
<i>Surel Correspondensi</i>	: ayubdwianggoro86@gmail.com

Pendahuluan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting karena menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan ini, masyarakat baik di desa maupun di kota mulai menyadari betapa mahalannya harga tubuh yang sehat. Hal tersebut bisa terlihat makin banyaknya tempat-tempat pusatkebugaran, baik fitness, aerobik, berenang, futsal, bulu tangkis dan sebagainya. Semua itu adalah untuk memperoleh badan yang bugar dan sehat karena dengan badan yang bugar dan sehat manusia bisa menikmati kehidupannya. Terkait dengan kesehatan masyarakat Indonesia, baru-baru ini Pemerintah menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai amanat Undang-

Undang No 40/2004, yang diawali dengan jaminan kesehatan per 1 Januari 2014. Sesuai dengan amanat UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Askes dan Jamsostek akan beralih dari badan usaha milik negara menjadi badan hukum publik BPJS Kesehatan (1 Januari 2014) dan BPJS Ketenagakerjaan (1 Juli 2015).

Awal pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Secara bertahap, semua penduduk Indonesia akan tercakup dalam program JKN pada tahun 2019. Ada aturan yang mengharuskan semua perusahaan swasta mendaftarkan karyawannya menjadi peserta JKN. Perusahaan yang menolak bisa dikenai sanksi administratif. Sejumlah peraturan pemerintah dan keputusan presiden terkait dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (24/12/2013). Dengan demikian, jaminan kesehatan nasional siap dilaksanakan pada 1 Januari 2014. Meskipun program tersebut telah mulai dilaksanakan, namun dalam kenyataannya masyarakat secara umum masih belum mengerti tentang Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tersebut. Karena sosialisasi tentang Undang-Undang tersebut masih terbatas melalui media massa baik elektronik maupun media cetak. Masyarakat di desa perlu sosialisasi secara langsung agar benar-benar paham dan hal ini nampaknya sulit dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karena jumlah pegawainya sangat terbatas.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka agar Undang-Undang tentang Jaminan Kesehatan Nasional berhasil disosialisasikan dan dilaksanakan khususnya pada masyarakat desa, maka peran *Opinion Leader* (pemuka pendapat) atau disebut sebagai pemimpin informal dalam melaksanakan sosialisasi Undang-Undang tersebut sangat penting. Oleh karena itu Oleh karena itu penelitian tentang pengembangan model sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional melalui peran *Opinion Leader* sangat penting.

Sosialisasi menurut Bruce J. Cohen adalah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku baik sebagai individu maupun sebagai anggota dari orang-orang di sekitarnya. Proses sosialisasi merupakan proses mempelajari dan menanamkan suatu nilai, norma, peran dan pola perilaku dari satu generasi ke generasi lain dalam hal sebuah kelompok atau masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan jenisnya sosialisasi menurut Soerjono Soekano dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi Primer yaitu sosialisai pertama yang dialami individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Dua sosialisasi Sekunder, yaitu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu. Tipe sosialisasi juga dibedakan menjadi dua, yaitu : pertama sosialisasi Formal, terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan Negara. Kedua Informal, terdapat dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, atau kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat.

Menurut George Herbert Mead, ada empat tahapan proses sosialisasi yang dilalui seseorang adalah sebagai berikut : Pertama, Tahap Persiapan (*prepatory stage*) yakni proses memperoleh pemahaman terhadap sesuatu di lingkungan sosialnya. Kedua, tahap meniru (*play stage*) yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain yang dianggap sebagai panutan. Ketiga, Tahap Memainkan (*game stage*) peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan diganti oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Keempat, Tahap Penerimaan Norma Kolektif (*generalized stage*). pada tahap ini seseorang telah dianggap mampu menempatkan dirinya menjadi warga masyarakat dalam arti yang sesungguhnya.

Bentuk atau Model Sosialisasi bisa digolongkan menjadi dua, yaitu model *system sosialisasi partisipatif* dan model *sosialisasi Represif*. Model *system partisipatif*, model sosialisasi ini secara sadar telah melibatkan orang lain dengan sukarela. Model ini dikembangkan oleh seseorang yang berkeinginan untuk sesuatu bentuk komunikasi serta hubungan dengan orang lain tanpa adanya paksaan. Inti dari sosialisasi ini ada kepentingan dua orang yang saling bersosialisasi satu sama lainnya, ada unsur kesadaran untuk melakukan komunikasi dan bersosialisasi. bentuk sosialisasi ini merupakan suatu kebebasan yang tidak untuk dipaksakan oleh pihak manapun dan oleh siapapun.

Kedua adalah model sosialisai *Represif*, sosialisasi ini berjalan dengan satu arah dari seseorang kepada orang yang lainnya. Hubungan seperti ini bisa dilihat di dalam suatu pola ataupun hubungan struktural yang ada di dalam suatu organisasi. Pengembangan Model sosialisasi dalam penelitian ini adalah Pengembangan dari sosialisasi atau proses pemahaman tentang Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan oleh pemerintah melalui media massa

kemudian dikembangkan melalui peran *opinion leader* dalam memberikan pemahaman dan pembentukan sikap untuk berperilaku kepada masyarakat desa di Kabupaten Ponorogo terkait dengan Jaminan Kesehatan nasional yang telah diberlakukan oleh pemerintah.

Kajian tentang Pemimpin masyarakat dalam Ilmu Komunikasi disebut *Opinion Leader* atau pemimpin opini, yang termasuk dalam hal ini adalah para tokoh-tokoh masyarakat desa, kiai ulama, bahkan dukun dan sebagainya. Di awal perkembangannya muncul di Amerika seperti yang telah ditunjukkan oleh **Paul Lazarfeld** dan kawan-kawan. Oleh karena itu, model-model arus informasi yang lebih mendekati untuk membahas pemimpin opini ini adalah model *two step flow* asumsi dasarnya adalah media massa tidak langsung mengenai audience tetapi melalui pemimpin opininya. Kemudian pemimpin itu meneruskan informasi tersebut kepada para pengikutnya. (Ardial,2008:198).

Peran *Opinion Leader* dalam kehidupan sosial di Indonesia juga tidak bisa dibilang rendah. Karena pemimpin opini sangat dipercaya masyarakatnya, ia ikut menentukan berbagai perilaku masyarakatnya. Di Indonesia pemimpin opini ikut menentukan apakah Program Keluarga Berencana (KB) yang dikampanyekan pemerintah pada tahun 70-an sukses atau tidak. Nyata bahwa kesuksesan program KB tidak lepas dari peran pemimpin opini ini. Bahkan, secara terang-terangan di kantor Kepala Desa di Patalan Jetis Bantul Yogyakarta ditulis bahwa para kiai dan tokoh masyarakat lain mendukung gerakan program KB pemerintah. Bahkan menyatakan bahwa KB halal dan sah. Kampanye lewat tulisan ini penting agar masyarakat yang semula ragu terhadap program KB tidak sangsi memakai alat kontrasepsi.

Hal tersebut bisa dilihat dari perkembangan penurunan angka kelahiran rata-rata penduduk di Indonesia. Pada periode 1961-1971 pertambahan penduduk rata-rata setahun sebesar 2,1% pada periode 1971-1980 sebesar 2,32% dan pada periode 1980-1990 menurun menjadi 1,98% (Masri Singarimbun,1996:3). Meskipun Masri Singarimbun tidak menyatakan secara eksplisit apa yang mempengaruhi penurunan angka kelahiran rata-rata per tahun, dalam hal ini pemimpin opini tidak bisa dianggap sedikit perannya. Ini artinya bahwa pemimpin opini khususnya di desa akan menjadi faktor utama berhasil tidaknya penurunan angka kelahiran yang menjadi salah satu program KB. Bisa dibayangkan bagaimana jika program KB tersebut tidak mendapat dukungan dari para pemimpin opini. Sekuat apapun keinginan pemerintah atau dipaksa dengan cara apaun, masyarakat tentu akan menganggap KB merupakan

program baru yang justru membatasi jumlah anak. Padahal di desa, filsafat hidup yang pernah berkembang adalah *banyak anak banyak rejeki*.

Pemimpin opini juga berperan dalam menentukan hari apa yang baik untuk bercocok tanam bagi warga desa. Bukan berarti bahwa warga desa khususnya tidak mengetahuinya, tetapi meminta legitimasi pemimpin opini akan lebih mantab daripada diputuskan sendiri. Apalagi tidak jarang para pemimpin opini itu melegitimasi dirinya dengan “kekuatan gaib”. Misalnya, ketika ada orang meminta bantuan “kekuatan gaib” sebelum memutuskan. Cara seperti ini tentu akan semakin menguatkan kedudukan pemimpin opini di mata masyarakat. (Ardial, 2008: 202)

Kiai punya alasan dikatakan sebagai pemimpin opini yang punya kekuatan M. Munandar Soelaiman (1998: 148) mengemukakan setidaknya-tidaknya bisa dilihat dari dua hal :

1. Memiliki kemampuan perasaan kemasyarakatan yang dalam dan tinggi (*highly developed social sense*).
2. Selalu melandaskan sesuatu pada kesepakatan bersama (*general consensus*).

Itu berarti kiai dianggap punya kekuatan yang tinggi di dalam mempengaruhi masyarakat karena bisa memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakatnya. Kiai sanggup menjawab berbagai macam persoalan yang ingin diketahui masyarakat. Kiai juga mampu “mengasuh masyarakat dengan menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Kiai dianggap orang yang punya pengaruh karena keilmuannya. Ia ahli dalam bidang agama sehingga sangat dibutuhkan masyarakat. Bahkan ia menjadi patron masyarakat atau ia sanggup melayani kliennya (masyarakat). Bahkan ia bisa berperan sebagai *pressure group* dan *rulling class* di pedesaan. Ia mampu menolak kebijakan pemerintah yang bertolak belakang dengan adat istiadat, aspirasi, atau norma di wilayahnya. Ia dengan kemampuan kharismaniknya melakukan perlawanan terhadap kebijakan tertentu.

Opinion Leader pada umumnya dibandingkan dengan masyarakat biasa mempunyai karakteristik-karakteristik diantaranya: pendidikan yang lebih formal, status social dan ekonomi yang lebih tinggi, lebih inovatif dalam mengadopsi gagasan-gagasan baru, lebih banyak bersentuhan dengan media massa, kemampuan empati yang lebih besar, partisipasi social yang lebih banyak dan lebih kosmopolitan. Keunggulan yang lain yang dimiliki oleh opinion leader dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan adalah lebih mudah menyesuaikan diri dengan masyarakatnya, lebih kompeten dan lebih tahu memelihara norma yang ada. Oleh karena itu

metode atau model sosialisasi dari Pemimpin Opini kepada masyarakat desa tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah, perlu dilakukan agar masyarakat desa benar-benar memahami dan menjalankan aturan tersebut.

Metode dan Kajian Pustaka

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena data yang hendak dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tentang Pengembangan Model sosialisasi para tokoh masyarakat atau pemimpin baik formal maupun informal yang dalam ilmu komunikasi disebut *opinion leader* atau *pemuka pendapat* kepada masyarakat di desa tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014. Jelas yang dikehendaki adalah informasi dalam bentuk deskripsi tentang bagaimana Pengembangan Sosialisasi yang digunakan oleh *opinion leader* tersebut tentang JKN.

Penelitian ini merupakan penelitian yang telah dilakukan di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo dengan alasan bahwa meskipun masuknya teknologi komunikasi di pedesaan telah menyebabkan terancamnya keberadaan pemimpin opini atau pemimpin informal (*opinion leader*), namun pemimpin opini di Kabupaten Ponorogo masih sangat berperan terutama di daerah pedesaan biasanya melalui musyawarah di desa atau kelompok tani atau menghadiri pengajian-pengajian yasinan yang diadakan setiap minggu dan di setiap dusun di desa.

Data yang digali lewat penelitian ini, sebagaimana disebutkan di atas adalah tentang Pengembangan Model Sosialisasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional melalui peran *opinion leader*. Oleh karena itu sumber data primer akan digali melalui sosialisasi para tokoh masyarakat di desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dan data pendukung dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam hal ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) di Ponorogo.

Informan dalam penelitian ini adalah Para pegawai BPJS Kabupaten Ponorogo dan beberapa tokoh masyarakat (*opinion leader*) yang terlibat dalam sosialisasi JKN biasanya melalui pengajian yasinan rutin baik yang diadakan oleh kelompok ibu-ibu maupun kelompok bapak-bapak. Beberapa ibu anggota yasinan juga beberapa bapak sebagai anggota kelompok tersebut. Penentuan informan tersebut akan dilakukan melalui teknik *snowball* (bola salju), dimana penggalan data akan dilakukan kepada para tokoh masyarakat tanpa menentukan jumlahnya, tetapi mencukupkan diri dengan kualitas informasi yang diberikan, artinya jika informasi dirasa sudah jenuh (tidak ada informasi baru lagi) dari informan yang diinterview, maka penggalan data akan dihentikan. Sementara itu, jika informasi yang digali dari para tokoh masyarakat atau pemimpin informal tersebut masih terus berkembang dan memenuhi kebaruan sesuai dengan fokus penelitian, maka penggalan data akan terus bergulir dan terus mencari informan baru sesuai dengan petunjuk yang diberikan informan lain yang telah diwawancarai. Demikian juga dengan informan pendukung yaitu anggota kelompok yasinan atau kelompok tani dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk menggali data tentang Pengembangan Model sosialisai melalui peran *opinion leader* kepada masyarakat desa tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali data tentang berbagai pandangan dan pendapat tentang Model sosialisasi *opinion leader* kepada masyarakat tentang JKN di desa Nlumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, yang melatari pandangan dari berbagai aspek, sesuai dengan ruang dan waktu subyek. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk pendokumenan baik berupa catatan kecil, buku, arsip tentang penelitian tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, mengacu pada pemikiran Max Weber yang mengatakan bahwa, pokok penelitian bukanlah kepada gejala-gejala sosial, tetapi lebih menekankan kepada memahami makna-makna yang terkandung dibalik tindakan individu yang mendorong terwujudnya gejala-gejal sosial tersebut. (Istbsyaroh,2004:14)

Pembahasan dan Analisis

Identifikasi Model Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah melalui BPJS

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan

sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Di Ponorogo JKN diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) saat ini berada di Jalan Bhayangkara no. 26 Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

Sosialisasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tingkat nasional bisa dilihat di media social internet www.jkn.kemkes.go.id di Ponorogo sudah dilakukan melalui instansi terkait, yaitu Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat, di Kecamatan, Puskesmas dan dipublikasikan lewat media social internet BPJS.Keshatan.go.id terkait alamat dan ode fasilitas kesehatan Ponorogo Tingkat 1 (Puskesmas, rumah sakit, optic, apotek dan faskes lainnya) per Januari 2016 Puskesmas Mlarak jalan Raya Mlarak Kabupaten Ponorogo, namun realisasinya berdasarkan hasil penelitian bahwa sosialisasi tersebut masih belum menyentuh langsung kepada masyarakat Desa.

Pemerintah menetapkan target bahwa tahun 2019 semua masyarakat Indonesia telah terdaftar dan mempunyai kartu Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Maka sudah menjadi keniscayaan perlunya model sosialisasi yang benar-benar bisa menyentuh rakyat agar target pemerintah bisa tercapai. Karena JKN-KIS sudah menjadi hal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya agar sehat dan sejahtera dan telah dituangkan dalam peraturan Pemerintah maka model sosialisasi yang dipakai tergolong ke dalam *Model sosialisasi Represif*. Sosialisasi ini berjalan dengan satu arah dari seseorang kepada orang yang lainnya. Hubungan seperti ini bisa dilihat di dalam suatu pola ataupun hubungan struktural yang ada di dalam suatu organisasi. Maka *Model Sosialisasi Partisipatif* juga diperlukan karena masyarakat sesuai dengan hasil penelitian, apabila terkena sakit yang harus ke dokter atau rumah sakit sangat membutuhkan JKN-KIS kesadaran masyarakat diharapkan tumbuh dari bawah bukan karena semaa-mata menjadalnkan aturan dari pemerintah.

Tipe sosialisasi juga dibedakan menjadi dua, yaitu : pertama sosialisasi Formal, terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan Negara. Kedua Informal, terdapat dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, atau kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentu ini merupakan sosialisasi yang

formal, oleh karena itu peran *opinion leader* yang dilakukan secara informal diperlukan untuk melengkapi sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah atau Negara.

Menurut George Herbert Mead, ada empat tahapan proses sosialisasi yang dilalui seseorang adalah sebagai berikut : Pertama, Tahap Persiapan (*preparatory stage*) yakni proses memperoleh pemahaman terhadap sesuatu di lingkungan sosialnya. Kedua, tahap meniru (*play stage*) yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain yang dianggap sebagai panutan. Ketiga, Tahap Memainkan (*game stage*) peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan diganti oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Keempat, Tahap Penerimaan Norma Kolektif (*generalized stage*). pada tahap ini seseorang telah dianggap mampu menempatkan dirinya menjadi warga masyarakat dalam arti yang sesungguhnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi JKN-KIS telah dilakukan dengan melibatkan instansi terkait dan melalui media baik elektronik maupun cetak serta media social masih berhenti pada pemimpin formal di desa itupun mereka masih merasa kurang paham karena sosialisasi mulai tahun 2014 sampai sekarang hanya dilakukan dua kali di tingkat kecamatan sesuai jawaban bapak Sucipto Kepala Desa Nglumpang dan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Jadi sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah yang telah dilaksanakan melalui BPJS dan melibatkan instansi terkait secara formal telah dilakukan tetapi belum menyentuh langsung dengan masyarakat, apalagi di masyarakat desa. Masyarakat di desa masih banyak yang belum atau tidak memanfaatkan media yang telah disiapkan oleh pemerintah atau BPJS. Masyarakat mengetahui dan memahami JKN dan sampai menjadi anggota atau memiliki kartu JKN-KIS karena sakit dan dirawat di rumah sakit karena biaya mahal dan tidak mampu membayar secara tunai maka mereka langsung mendaftarkan diri JKN-KIS agar bisa membayar lebih ringan dan murah karena dibayarkan setiap bulan sesuai dengan kelas yang diinginkan berdasarkan aturan terbaru yaitu kelas 1 per bulan emembayar Rp. 80.000,- kelas 2 Rp. 51.000,- dan kelas 3 Rp. 25.500,-

Disamping permasalahan iuran yang dirasa tinggi oleh masyarakat di desa bahkan perangkat desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo belum menjadi peserta JKN-KIS, permasalahan pelayanan juga masih belum maksimal sehingga masyarakat masih

merasa belum puas tetapi sebagian masyarakat juga sudah merasa puas dengan pelayanan JKN yang benar-benar gratis.

Identifikasi Model Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional melalui *Peran Opinion Leader*

Pemerintah telah mencanangkan bahwa pada tahun 2019 semua masyarakat Indonesia harus sudah terdaftar dan menjadi anggota JKN-KIS baik yang dibiayai oleh pemerintah maupun mandiri. Sosialisasi tentang JKN-KIS harus dilakukan secara intensif dan tepat sasaran agar apa yang diharapkan oleh pemerintah bisa terwujud. Sosialisasi JKN-KIS yang dilakukan oleh Pemerintah melalui BPJS dan dinas Kesehatan masih dirasa kurang oleh instansi terkait utamanya di tingkat kecamatan dan desa apalagi oleh masyarakat secara langsung. Oleh karena itu perlu pengembangan model sosialisasi agar Sosialisasi bisa mengena langsung pada masyarakat. Di tingkat desa adalah tempat paling dekat dengan masyarakat, maka sosialisasi JKN-KIS sebaiknya diteruskan oleh Kepala Desa dan Kaur Kesra atau di desa dikenal dengan Modin dan tokoh masyarakat atau para pemimpin di desa dalam Ilmu Komunikasi di sebut sebagai *Opinion Leader*.

Di dalam komunikasi massa dalam hal ini tentang JKN-KIS kurang efektif dalam pembentukan sifat personal karena komunikasi tidak kemudian dapat langsung diterima oleh massa, tetapi melalui *Opinion Leader* ialah yang kemudian menterjemahkan apa yang disampaikan dalam komunikasi massa itu pada komunikan dalam hal ini kepada masyarakat di desa. pada komunikasi massa *Opinion Leader* secara langsung akan diduduki oleh pelaku komunikasi organisasi, demikian juga komunikasi organisasi memiliki *opinion leader* dari level-level di bawahnya. Hal yang mendasar yaitu bahwa *opinion leader* memiliki posisi yang cukup kuat untuk mempengaruhi khalayak kekuatan itu dapat berasal faktor budaya, agama dan pengalaman.

Kehadiran sosok *opinion leader* menunjukkan adanya keterlibatan yang kuat dari komunikasi interpersonal dalam proses komunikasi massa secara keseluruhan. Di dalam teori komunikasi *Two Step Flow Model* sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori pada bab terdahulu bahwa dengan model alir komunikasi massa dua tahap, *opinion leader* merupakan orang-orang tertentu de dalam khalayak yang mempunyai pengaruh besar atas anggota-anggota khalayak yang lain, baik dalam pembentukan opini maupun dalam proses pembentukan keputusan.

Opinion leader adalah orang-orang yang secara informal membimbing dan mengarahkan suatu opini tertentu kepada masyarakat. *Opinion leader* menjadi tempat bertanya masyarakat desa dalam hal atau masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. *Opinion leader* merupakan individu dalam masyarakat yang menerima informasi dari media dan meneruskannya dalam kelompok asalnya. Juga dikatakan sebagai orang yang secara informal dapat mempengaruhi tindakan atau sikap dari orang-orang lain baik mereka orang yang sedang mencari-cari informasi (*opinion seeker*) atau yang sekedar menerima informasi secara pasif (*opinion recipient*).

Opinion leader dalam sosialisasi JKN-KIS sebagaimana hasil penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pertama *Opinion leader* Aktif (Opinion Giving) disini para *opinion leader* dalam hal ini para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat desa tersebut sengaja memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang JKN-KIS tersebut. Kedua *opinion leader* pasif (*opinion seeking*) dalam hal ini masyarakat desa lebih aktif mencari informasi tentang JKN-KIS kepada *opinion leader* sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi terkait dengan pentingnya JKN-KIS terutama pada saat mengalami sakit yang memerlukan pengobatan lebih intensif. Oleh karena itu kedua-duanya baik masyarakat di desa maupun para tokoh atau *opinion leader* bisa termasuk dalam kelompok yang aktif maupun pasif.

Sebagaimana tipe sosialisasi yang dibedakan menjadi dua, yaitu : pertama sosialisasi Formal, terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan Negara. Kedua Informal, terdapat dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, atau kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentu ini merupakan sosialisasi yang formal, oleh karena itu peran *opinion leader* yang dilakukan secara formal maupun informal diperlukan untuk melengkapi sosialisasi tentang JKN-KIS yang telah dilakukan oleh pemerintah atau Negara.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa sosialisasi tentang JKN-KIS yang dilakukan oleh *opinion leader* di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dengan cara formal melalui rapat di desa, posyandu, PKK. Dan uyang informal melalui pengajian Yasinan baik kelompok bapak-bapak dan kelompok ibu-ibu, takziah bersama, menjenguk orang sakit bersama, kerja bakti, dan macam-macam kenduren,

Kesimpulan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia, Pemerintah Indonesia berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Diantaranya telah Menyeleng garakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai amanat Undang-undang No.40/2004, yang diawali dengan Jaminan Kesehatan Nasional per Januari 2014 sesuai amanat UU no.24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Askes dan Jamsostek akan beralih dari Badan Usaha Milik Negara menjadi Badan Hukum Publik BPJS Kesehatan (1 Januari 2014) dan BPJS Ketenagakerjaan (1Juli 2015). Secara bertahap, semua penduduk Indonesia akan tercakup dalam program JKN pada tahun 2019.

Pemerintah menetapkan target bahwa tahun 2019 semua masyarakat Indonesia telah terdaftar dan mempunyai kartu Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Maka sudah menjadi keniscayaan perlunya model sosialisasi yang benar-benar bisa menyentuh rakyat agar target pemerintah bisa tercapai. Karena JKN-KIS sudah menjadi hal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya agar sehat dan sejahtera dan telah dituangkan dalam peraturan Pemerintah maka model sosialisasi yang dipakai tergolong ke dalam *Model sosialisasi Represif*. ssosialisasi ini berjalan dengan satu arah dari seseorang kepada orang yang lainnya. Hubungan seperti ini bisa dilihat di dalam suatu pola ataupun hubungan struktural yang ada di dalam suatu organisasi. Maka *Model Sosialisasi Partisipatif* juga diperlukan karena masyarakat sesuai dengan hasil penelitian, apabila terkena sakit yang harus ke dokter atau rumah sakit sangat membutuhkan JKN-KIS maka kesadaran masyarakat diharapkan tumbuh dari bawah bukan karena semaa-mata menjalankan aturan dari pemerintah.

Pelaksanaan sosialisasi tentang JKN-KIS seharusnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja baik pusat maupun daerah tetapi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat secara keseluruhan. Melalui peran Opinion Leader baik secara formal maupun diformal di masyarakat desa sangat dibutuhkan karena Opinion Leader sangat dekat dengan masyarakat dan tempat bertanya terkait dengan semua aspek kehidupan masyarakat desa, selain memahami JKN-KIS tersebut ada kesadaran untuk menjadi peserta JKN-KIS baik yang dibiayai pemerintah maupun membayar iuran secara mandiri.

Dengan menggunakan model asuransi JKN-KIS diharapkan ada keseimbangan bahwa yang mempunyai kelebihan di aspek ekonomi bisa membantu dan tumbuh rasa gotong royong

agar masyarakat yang masih kekurangan bisa terbantu., sehingga masyarakat yang status ekonomi yang kurang dibiayai oleh pemerintah sedangkan yang status ekonomi menengah ke atas membayar secara mandiri.

Data peserta JKN-KIS di BPJS maupun di Kecamatan Puskesmas dan di Desa belum tercatat secara terperinci terutama JKN-KIS yang mandiri. Data JKN-KIS yang dibiayai pemerintah sudah terperinci tetapi masih banyak masyarakat yang belum terdaftar karena perbedaan persepsi dalam menggolongkan tentang penetapan kondisi keadaan atau status ekonomi masyarakat dari berbagai instansi terkait.

Berdasarkan temuan penelitian tentang Pengembangan Model Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional melalui Peran Opinion Leader di desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupten Ponorogo, maka disarankan sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah baik pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Instansi terkait tentang Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat diharapkan lebih intens dalam pelaksanaan sosialisasi karena masih banyak masyarakat yang belum memahami terutama JKN-KIS Mandiri.
2. Dalam melaksanakan sosialisasi JKN-KIS agar melibatkan peran Opinion Leader terutama di tingkat desa baik dengan formal maupun informal karena mereka sangat dekat dengan rakyat.
3. Pemerintah dan Dinas terkait meninjau kembali dalam menentukan status ekonomi masyarakat sehingga memiliki persepsi yang sama dalam menentukan masyarakat mana yang terdaftar JKN-KIS yang dibiayai oleh Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007
- Ardial, *Komunikasi Politik*, PT. Indeks, Jakarta, 2010.
- Deddy Mulyana, *Komunikasi Massa, Kontroversi, Teori dan Aplikasi*, Widya Padjadjaran, Jakarta 2008
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi II, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Jusuf Harsono dan Rony handayanto, *Penyusunan Pedoman Pembuatan Perangkat Kesenian Reyg Ponorogo Sebagai Upaya Mempertahankan dan Melestarikan Budaya Adiluhung*, Laporan Penelitian Hibah Bersaing 2009.
- Nurudin, dkk. *Agama Tradisional, Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*, Malang, LKIS dan FISIP UMM, 2003
- Rahardjo Hadisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006
- Redi Panuju, M.Si., *Komunikasi Organisasi, dari Konseptual-Teoritis ke Empirik*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001.
- Totok Mardikanto, *Komunikasi Pembangunan, Acuan bagi Akademisi, Praktisi dan Peminat Komunikasi Pembangunan*, UNS Press, Solo, 2010